

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang begitu pesat yang menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih banyak berpihak kepada para pemilik modal. Mirfazli (2008) menyatakan bahwa paradigma akuntansi telah berubah dengan fokus memperluas pada tanggungjawab untuk semua pemangku kepentingan. Wallage (2000) berpendapat bahwa tanggungjawab sosial dan pelaporan keberlanjutan yang baik harus memberikan informasi yang relevan, netral, dapat dimengerti dan lengkap. Misalnya, kelengkapan tersebut harus mencakup komunikasi yang komprehensif dari semua faktor risiko utama yang dialami oleh perusahaan.

Linsley dan Shrives (2006) menyatakan bahwa persepsi risiko pada zaman sekarang telah berubah. Sementara pada zaman sekarang, risiko dipandang secara positif atau negatif dalam menanggapi hasil dari segudang peristiwa yang terjadi. Karena dualitas persepektif risiko inilah, *stakeholder* perlu informasi lebih lanjut tentang pengungkapan risiko perusahaan untuk tujuan bisnis dan pengambilan keputusan investasi serta memahami secara lebih baik mengenai tanggungjawab sosial perusahaan.

Konsep asimetri informasi antara manajemen (agen) dan investor (principal) adalah bahwa beberapa informasi akan diberikan namun data terkait lainnya dapat ditahan. Penurunan asimetri informasi akan menyebabkan biaya monitoring yang lebih rendah antara agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Fahed-Sreih (2009) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) telah terbukti menjadi pelajaran akademis yang menonjol untuk diselidiki baik dalam bisnis keluarga maupun perusahaan yang *listing* dalam pasar bursa. Berbagai metode dan pendekatan yang berbeda diambil oleh para peneliti untuk mengeksplorasi tema terkait dengan *corporate governance*. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen (Schipper dan Vincent, 2003).

Pemisahan kepemilikan dan kontrol menciptakan masalah keagenan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Fama dan Jensen, 1983). Akibatnya, manajer dapat mengambil tindakan yang tidak untuk kepentingan para pemegang saham. Karena pemegang saham biasanya tersebar dan tidak memiliki kemampuan untuk langsung memantau dan kontrol tindakan manajer, maka kinerja perusahaan dapat dirugikan. Selain itu, manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaan dari pemegang saham. Asimetri informasi ini menciptakan biaya bagi para pemegang saham karena mereka tidak dapat membuat keputusan. Satu set mekanisme *governance* dapat diimplementasikan untuk mengurangi masalah tersebut. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa manajer akan bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Selain itu, dapat memaksa manajer untuk mengungkapkan

informasi penting sehingga asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalkan. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki lebih banyak pengungkapan akan memiliki risiko yang kecil. Hal inilah mengapa topik *corporate governance* dengan pengungkapan risiko menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Tekanan dari berbagai pihak muncul terhadap sektor swasta untuk menerima tanggung jawab dampak pengaruh aktivitas bisnis terhadap masyarakat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan manajemen tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas (Hackston dan Milne, 1996). Namun pelaporan keuangan kerap kali gagal dijadikan alat komunikasi antara manajemen sebagai *agent* dan pemilik sebagai *principal* atau pemegang saham (Silverira dan Barros, 2007; Siagian *et al.*, 2013). Sedangkan informasi tersebut tertuang dalam laporan-laporan tahunan perusahaan yang telah *go public*. Dengan demikian laporan tahunan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang pengungkapan risiko perusahaan/*corporate risk disclosure* (CRD).

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitasnya. Dengan demikian, peran *corporate governance* (CG) sebagai faktor kelembagaan, hukum, dan budaya yang penting bagi

perusahaan di pasar serta industri negara berkembang. Maka *corporate governance* berusaha memastikan bahwa pengambilan keputusan oleh pihak manajemen difokuskan pada penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui penciptaan modal intelektual (Safieddine, Jamali, dan Nouredine, 2009).

Pada mulanya penelitian mengenai *corporate governance* dikaitkan dengan kinerja dan nilai sebuah perusahaan, kemudian hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu saja seperti halnya karakteristik kepemilikan perusahaan, peran dewan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wang *et al.*, 2015; Zagorchev dan Gao 2015; Aebi *et al.*, 2012; Thomsen 2014) dan siklus hidup perusahaan (Filatotchev *et al.*, 2006; O'Connor dan Byrne, 2015) serta praktek manajemen laba (Man dan Wong 2013; Xie *et al.*, 2003; Yang dan Tan 2012; Iqbal dan Strong 2012). Dalam perkembangannya, hubungan antara *corporate governance* dan risiko perusahaan mulai dicermati, misalnya: Wang *et al.*, (2015) menemukan bahwa *corporate governance* yang ditunjukkan dengan *Governance Index* (Gindex) dan konsentrasi pasar produk memiliki efek negatif terhadap efek risiko *downside* perusahaan serta menemukan hubungan positif antara *corporate governance* dan nilai perusahaan.

Hutchinson *et al.*, (2015) menginvestigasi pengaruh kepemilikan institusional dalam hubungan antara risiko dan kinerja perusahaan yang dilakukan pada perusahaan Bursa Efek Australia (ASX) pada saat krisis global tahun 2006-2008 yang menemukan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional berhubungan dengan ukuran manajemen risiko perusahaan secara komprehensif, serta

peningkatan kepemilikan institusional berhubungan positif dengan kinerja akuntansi dan nilai perusahaan. Sedangkan, Iskander dan Chamlou (2000) memberikan bukti konsekuensi negatif dari lemahnya tata kelola perusahaan dengan menemukan bukti bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan negara dan sekitarnya salah satunya terjadi karena lemahnya *corporate governance*, standar akuntansi, lemahnya hukum dan pemeriksaan keuangan yang belum kredibel, pasar modal yang *under-regulated*, pengawasan Dewan Komisaris yang masih lemah, dan terabaikannya hak minoritas merupakan yang menjadikan rendahnya kualitas *corporate governance* dinegara-negara tersebut.

Man dan Wong (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan *Good Corporate governance* (GCG) di banyak negara telah mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki kinerja dan memungkinkan akses yang lebih baik terhadap modal dari luar perusahaan. *Corporate governance* juga bertujuan untuk mengendalikan tindakan oportunistik manajemen yang dapat menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan agar terciptanya nilai tambah (*value added*) bagi seluruh *stakeholder* perusahaan (Dechow, Ge, & Schrand, 2010).

Carter et al. (2002) menyatakan bahwa masalah penting dalam tata kelola yang dihadapi oleh manajer, Dewan Direksi, dan pemegang saham pada perusahaan modern adalah mengenai komposisi gender, ras dan budaya dari dewan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. *National Association of Corporate Directors Blue Ribbon Commission* juga merekomendasikan bahwa diversitas gender, ras, umur, dan kebangsaan harus dipertimbangkan dalam pemilihan

dewan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Isu mengenai diversitas dewan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kode etik perusahaan juga dipertimbangkan ketika menilai efektivitas pengambilan keputusan perusahaan. Keduanya dipandang sebagai indikator independensi dan akuntabilitas pembuatan keputusan (Maier, 2005).

Meskipun banyak penelitian yang ada berhubungan dengan pengungkapan akuntansi dan menyelidiki hubungan antara tingkat pengungkapan, negara dan atau karakteristik-karakteristik spesifik perusahaan. Namun beberapa tahun terakhir banyak perhatian untuk menyelidiki dan meningkatkan pengungkapan risiko perusahaan (CRD). Beberapa peneliti berpendapat bahwa CRD telah menjadi bagian integral dari pengungkapan bisnis karena memberikan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan investor (Linsley dan Shrivess, 2006; Abraham dan Cox, 2007; Iatridis, 2008; Linsley and Lawrence, 2007).

Penelitian ini menarik untuk diteliti dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan terletak pada waktu penelitian dilakukan yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun yakni tahun 2012-2014 dengan menggunakan objek penelitian yang lebih banyak yakni seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian. Kemudian, didalam penelitian terdahulu hanya mencari pengaruh *corporate governance* terhadap *earnings management* (Man dan Wong 2013), kinerja dan nilai perusahaan (Brown dan Caylor 2006), serta struktur kepemilikan (Mokhtar dan Mellett, 2013). Namun, pada penelitian ini lebih jauh mengeksplorasi mengenai *corporate governance*

yang diproksikan oleh proporsi dewan independen (komisaris dan Dewan Direksi), Proporsi kewarganegaraan dewan asing (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) dan diversitas Gender dewan (komisaris dan Dewan Direksi) dalam pengukuran kaitannya dengan pengungkapan risiko perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan modifikasi dari berbagai penelitian sebelumnya yang masih memerlukan pengujian ulang untuk menjawab permasalahan seperti dijelaskan diatas. Diharapkan melalui penelitian ini akan dapat diketahui apakah investor bersedia memberikan penilaian yang lebih tinggi bagi perusahaan yang mempunyai pengungkapan risiko lebih baik.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pengujian ini menguji pengaruh praktek *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko perusahaan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan *go public* Indonesia. Pentingnya peranan *corporate governance* dalam meminimalisir risiko dengan cara mengungkapkan risiko-risikonya didalam laporan tahunan merupakan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Selama ini kontribusi *corporate governance* dalam mengurangi biaya keagenan melalui pengungkapan risiko perusahaan di Indonesia belum dieksplorasi lebih lanjut. Selama ini, sebagian besar penelitian *corporate governance* di Indonesia mengaitkan CG dengan kinerja (Wang *et al.*, 2015; Zagorchev dan Gao 2015; Aebi *et al.*, 2012; Thomsen 2014). Berdasarkan argumentasi tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan risiko perusahaan ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi Kewarganegaraan asing Dewan Komisaris dengan pengungkapan risiko perusahaan ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Diversitas Gender Dewan Komisaris dengan pengungkapan risiko perusahaan ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi Dewan Direksi Independen dengan pengungkapan risiko perusahaan ?
5. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi Kewarganegaraan asing Dewan Direksi dengan pengungkapan risiko perusahaan ?
6. Apakah terdapat pengaruh antara Diversitas Gender Dewan Direksi dengan pengungkapan risiko perusahaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris tentang proporsi Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan risiko perusahaan *go public* di Indonesia.
2. Memberikan bukti empiris tentang proporsi kewarganegaraan asing Dewan Komisaris dengan pengungkapan risiko perusahaan *go public* di Indonesia.
3. Memberikan bukti empiris tentang Diversitas Gender Dewan Komisaris dengan pengungkapan risiko perusahaan *go public* di Indonesia.

4. Memberikan bukti empiris tentang proporsi Dewan Direksi Independen dengan pengungkapan risiko perusahaan *go public* di Indonesia.
5. Memberikan bukti empiris tentang proporsi kewarganegaraan asing Dewan Direksi dengan pengungkapan risiko perusahaan *go public* di Indonesia.
6. Memberikan bukti empiris tentang Diversitas Gender Dewan Direksi dengan pengungkapan risiko perusahaan *go public* di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya berkaitan dengan pengkajian risiko perusahaan. Sistem ekonomi pasar modal yang banyak mengandung spekulasi dan ketidakpastian dalam semua aspek ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam pasar modal. Dengan demikian, segala risiko dan ketidakpastian dalam berinvestasi di pasar modal dapat di ramalkan dan diperkirakan sejak dini sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Manfaat bagi Investor dan calon investor

Perusahaan atau investor dan atau calon investor yang ingin melakukan investasi dan diversifikasi pada saham yang dimilikinya, diharapkan penelitian ini perusahaan maupun investor dapat menerapkan dan mengambil keputusan investasi yang menguntungkan dengan menilai kualitas tata kelola perusahaan dan penciptaan nilai dari perusahaan.

3. Bagi manajemen perusahaan agar *mempraktikkan Good Corporate governance* dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan pada akhirnya mampu meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi tingkat risiko perusahaan.